

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN PROBOLINGGO (TAHUN ANGGARAN 2002-2014)
(Performance Analysis of Financial Management and Independence in The Era Autonomy Region: A Case Study of Probolinggo Regency (Fiscal Year 2002-2014))

Poppy Kemalasari, Rafael Purtomo Somaji, Sarwedi

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

Email: kemalasarioppy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian serta trend kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo di era otonomi daerah tahun anggaran 2002-2014. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif berupa rasio keuangan daerah dan trend pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan data sekunder tahun anggaran 2002 hingga tahun 2014 yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan pada APBD Kabupaten Probolinggo dan trend dari tingkat kemandirian daerah Kabupaten Probolinggo pada variabel rasio keuangan daerah, IKR, Rasio aktivitas masih rendah sehingga belum mencerminkan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan rasio efektivitas dan pertumbuhan PAD telah menunjukkan pertumbuhan positif. Trend dari rasio keuangan dan tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan dan mempertahankan pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2002-2014 telah berjalan efektif.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Analisis Trend.

Abstract

This research aims to analyze the performance of financial management and the level of independence and performance trends of regional financial management Probolinggo regency administration decentralization of fiscal year 2002-2014. The analytical method used is quantitative descriptive analysis in the form of local financial ratios and financial management trends using secondary data of the fiscal year 2002 to 2014 were obtained from the Office of Financial Management Probolinggo. Results of this study indicate that the financial ratios in Probolinggo district budget and the trend of the degree of independence precinct of Probolinggo in the area of financial ratio variables, IKR, the activity ratio is still low so as not reflect local financial independence. While the ratio of effectiveness and revenue growth have shown positive growth. Trend of financial ratios and levels of independence demonstrated ability Probolinggo district government in realizing and retaining local revenues in the period 2002-2014 has been effective.

Keywords: Autonomy, Financial Performance, Financial Ratios, Trend Analysis.

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah pusat melakukan seluruh pengaturan ekonomi, membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat. Namun, krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia menyadarkan pemerintah dan masyarakat akan kebutuhan reformasi total. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kemandirian daerah. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah.

Adanya UU tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan ditetapkannya otonomi daerah sejak awal tahun 2001. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Wilayah Kabupaten Probolinggo salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur. Luas wilayah mencapai 1.696.160 km² merupakan daerah lahan persawahan. Wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan dan tersebar menjadi 330 desa. tiap tahunnya realisasi PAD Kabupaten Probolinggo dalam jangka waktu 7 tahun yaitu mulai tahun 2006-2012 mengalami fase peningkatan berturut-turut. Hal ini terbukti dari dimana total PAD pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 7% sehingga menjadi Rp. 42.548.002.266. Begitu juga pada tahun 2010 total PAD Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebanyak 7% sehingga total menjadi Rp. 46.024.665.849. Pada tahun 2011 total PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 39% peningkatannya sehingga total menjadi Rp. 75.654.859.912. Peningkatan total PAD terus berlanjut pada tahun 2012 yaitu sebesar 16% sehingga pencapaian total menjadi Rp. 90.009.457.309. Hal ini memberikan gambaran bahwa potensi daerah yang ada apabila dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD di era otonomi daerah tahun anggaran 2002-2014 dan Bagaimana trend dari tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo di era otonomi daerah tahun anggaran 2002-2014.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mardiasmo (2002:59).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi (Mulyadi, 2009). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terdapat dalam APBD selain Dana Sisa Anggaran Tahun Lalu, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Daerah yang sah. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah sumber penerimaan keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan itu murni seluruhnya menjadi hak milik pemerintah daerah tanpa harus dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah (basis akrual) merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih (Panggabean, 2009:33).

Belanja Daerah

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004:24), kinerja keuangan daerah atau kemampuandaerah merupakan ssalah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hadirnya otonomi daerah yang dimulai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentunya membawa konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Sebelum era otonomi daerah, hampir sebagian pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia

memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini nantinya menjelaskan seberapa besar kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu tahun 2002-2014 dan bagaimana meningkatkan PAD.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data kurun waktu (*time series*) tahun anggaran 2002-2014. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, BPS Kabupaten Probolinggo, BPS Provinsi Jawa Timur, dan literatur lainnya.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang ada. Hal ini untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada masa otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan kemampuan pemerinth daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (Widodo,2001:262)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD} / \text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi X 100\%}$$

Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00%-25,00%	Instruktif
Rendah	25,01%-50,00%	Konsultif
Sedang	50,01%-75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007:169)

Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan pada potensi suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai belanja rutin daerah. Formula untuk menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) seatu pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Berti, 2006) :

$$\text{IKR} = \text{PAD} / \text{Total Belanja Rutin X 100\%}$$

%IKR	Kemampuan Keuangan Daerah
0-20	Sangat Kurang
20-40	Kurang
40-60	Cukup
60-80	Baik
80-100	Sangat Baik

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Halim, 2007:234)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan PAD X 100\%}$$

Kriteria	Presentase Kinerja Keuangan
Tidak Efektif	X < 100%
Efektivitas Berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

Sumber: Mahsun (2009)

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut (Widodo, 2001:262):

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \text{Total Belanja Rutin} / \text{Total APBD X 100\%}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \text{Total Belanja Pembangunan} / \text{Total APBD X 100\%}$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Widodo,2001:270).

Pertumbuhan $PAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$

Analisis Trend

Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Dalam analisis trend, digunakan analisis *time series* dengan persamaan trend sebagai berikut (Suprpto, 2006) :

$$Y' = a + bX$$

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Probolinggo pada posisi $7^{\circ}40'$ sampai dengan $8^{\circ}10'$ LS dan $111^{\circ}50'$ sampai dengan $113^{\circ}30'$ BT dengan luas wilayah mencapai $1.696.160 \text{ km}^2$ dimana sebesar 371.520 km^2 merupakan daerah lahan persawahan. Batas administrasi Kabupaten Probolinggo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan diketahui seberapa besar kinerja keuangan suatu daerah. Melalui analisis ini juga nantinya akan diketahui apakah perkembangan kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan, penurunan atau stagnan. Caranya yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dalam satu periode anggaran APBD dengan satu periode anggaran APBD tahun sebelumnya. Berikut hasil analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan metode rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio belanja terhadap APBD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Probolinggo selama tahun 2002-2014 mengalami fase naik turun (fluktuatif). Menurunnya pertumbuhan rasio kemandirian 2002-2006 menunjukkan bahwa penerimaan PAD lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat/provinsi sehingga mengakibatkan pertumbuhan rasio kemandirian menurun. Berdasarkan perhitungan mengenai rasio kemandirian Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa tahun anggaran 2007 memiliki tingkat kemandirian tertinggi dengan nilai rasio 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2007 memiliki kemandirian daerah yang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat daripada tahun anggaran lainnya. Tingkat

kemandirian Kabupaten Probolinggo pada tahun anggaran 2007, meningkat lebih daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, peningkatan PAD pada tahun 2007 sebesar 11,26%.

Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Berdasarkan perhitungan pada tabel mengenai tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 15,94%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tergolong masih kurang mampu dalam rangka membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Berdasarkan nilai indeks kemampuan rutin Kabupaten Probolinggo, tahun anggaran 2004 memiliki tingkat kemampuan tertinggi dengan nilai rasio sebesar 25,92%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2004 memiliki kemampuan keuangan dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat yang lebih baik daripada tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan tingkat kemampuan rutin yang paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2010 dengan tingkat rasio sebesar 6,54%.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel mengenai tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 114,80%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan efektif dalam melakukan pemungutan PAD karena berada pada nilai minimum rasio efektivitas yaitu diatas 100%. Berdasarkan rasio efektivitas selama 2002-2012, tahun anggaran 2006 memiliki tingkat efektivitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 144,84%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2006 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan entitas yang telah ditetapkan sebelumnya daripada tahun anggaran setelahnya.

Rasio Aktivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel mengenai tingkat aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berkisar pada rata-rata 51,73% untuk belanja rutin terhadap APBD dan 43,90 untuk belanja pembangunan terhadap APBD. Berdasarkan rasio aktivitas selama 2002-2012, tahun anggaran 2008 memiliki rasio tertinggi untuk belanja rutin terhadap APBD dengan nilai rasio sebesar 70,64%. Sedangkan yang paling rendah untuk rasio belanja rutin ada di tahun 2005 dengan nilai rasio sebesar 1,58%. Untuk rasio belanja pembangunan terhadap APBD, rasio tertinggi ada pada tahun anggaran 2006 dengan rasio pembangunan sebesar 83,74% sedangkan untuk rasio terendah ada pada tahun anggaran 2005 dengan nilai rasio sebesar 6,18%.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada tabel, pertumbuhan PAD Kabupaten Probolinggo cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2005 sempat mengalami penurunan sebesar

-8,45%. Namun pada tahun berikutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo mampu meingkatkan kembali pertumbuhan PAD sebesar 14,78%. Pada tahun 2011, pertumbuhan PAD mengalami peningkatan tertinggi sebesar 64,7%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pos PAD mengalami pertumbuhan yang meningkat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dengan menggunakan 5 metode menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan rasio kemandiriannya, rata-rata rasio sebesar 25,35% yang menunjukkan dimana pola kemandirian daerahnya berada pada pola kemandirian yang instruktif. Hasil dari perhitungan rasio IKR, rata-rata rasio sebesar 15,94% yang menunjukkan bahwa kemampuan kinerja keuangan daerah masih kurang mampu dalam rangka membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan rasio efektifitas, rata-rata rasio sebesar 114,80% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berjalan efektif. Hasil perhitungan rasio aktivitas terhadap APBD menunjukkan bahwa selama kurun waktu 13 tahun kinerja keuangan masih didominasi oleh belanja rutin. Hasil dari rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Probolinggo cenderung meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang terdapat didaerahnya sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pos PAD mengalami pertumbuhan yang meningkat. Berdasarkan dari analisis trend kemandirian keuangan daerah dapat diketahui bahwa proyeksi tingkat kemandirian daerah Kabupaten Probolinggo untuk lima (5) tahun yang akan datang akan terus mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka/Rujukan

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mahsun Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF, Yogyakarta.
- Mardiasmo, April 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Panggabean, Henri Edison H. 2009. *Pengaruh Pendapatn Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara: Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.